

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3129/Pid.B/2021/PN.Mdn)

**M. Safii Sitorus**

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuk yang berkembang.

Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penggelapan menurut hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil serta pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana penggelapan dalam putusan Nomor 3129/Pid.B/2021/PN.Mdn.

Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu bahwa Pengaturan hukum tentang tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377 KUH Pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil adalah didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan mobil maka Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana penggelapan dalam putusan Nomor 3129/Pid.B/2021/PN.Mdn tidak sesuai meskipun telah terpenuhinya unsur unsur pasal 372 KUHP sesuai dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Karena majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal atau dengan menjatuhkan pidana denda untuk mengganti kerugian saksi korban. Mengingat perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian yang cukup besar serta terdakwa selama ini mejadi seorang penadah.

Kata Kunci: **Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pelaku, Penggelapan, Mobil.**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL REVIEW OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CAR EMBAGLEY PERPETRATORS (Study of Medan District Court Decision Number 3129/Pid.B/2021/PN.Mdn)**

**M. Safii Sitorus**

*Crime will not disappear by itself, on the contrary, crime cases are increasingly frequent and the most dominant is the type of crime against property, especially including embezzlement. Embezzlement is one type of crime that occurs in society with various forms that develop.*

*The problem in this thesis research is how the legal regulations regarding the crime of embezzlement according to positive law in Indonesia, criminal liability for perpetrators of the crime of car embezzlement and the judge's legal considerations in imposing a criminal embezzlement sentence in decision Number 3129/Pid.B/2021/PN.Mdn.*

*The research uses descriptive analytical research, the type of research used in this research is normative juridical using library research and data analysis using qualitative methods which produce descriptive-analytical data*

*The conclusion in this thesis research is that the legal provisions regarding the crime of embezzlement are regulated in Articles 372 to 377 of the Criminal Code. Criminal liability for perpetrators of the crime of car embezzlement is based on the elements of error and intent in committing the crime, the defendant's ability to be responsible, there is no justification and forgiveness for the defendant in committing the crime of car embezzlement, so the panel of judges sentenced the defendant to imprisonment for 2 (two) years 6 (six) months. The judge's legal considerations for imposing a criminal embezzlement in decision Number 3129 / Pid.B / 2021 / PN.Mdn are not appropriate even though the elements of Article 372 of the Criminal Code have been fulfilled according to the first alternative indictment of the public prosecutor. Because the panel of judges only imposed a prison sentence lower than what was demanded by the public prosecutor, namely imprisonment for 2 (two) years 6 (six) months. The panel of judges should have imposed the maximum sentence or imposed a fine to compensate for the losses of the victim witness. Considering that the defendant's actions caused the victim witness to suffer quite a large loss and that the defendant had been a receiver of bribes*

**Keywords : Criminal Liability, Crime, Perpetrator, Embezzlement, Car**